



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 124 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

Nomor

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rencana Kerja Satuan selanjutnya disebut Renja Satuan, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Renstra Satuan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2045.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

5. Perencanaan....

- 5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun.
- 7. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
- 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
- 11. Daerah adalah Kabupaten Ende.
- 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
- 13. Bupati adalah Bupati Ende.
- 14. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
- 15. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.

BAB II
RENJA DINAS
Pasal 2

(1) Renja Satuan disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

(2). Renja

- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi satuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Tahun 2026.
- (3) Renja satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap Satuan yang disusun berpedoman kepada Renstra satuan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Satuan Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja Satuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SATUAN TAHUN 2025
 - BAB II : TUJUAN DAN SASARAN SATUAN
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Satuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Satuan dalam menyusun Rencana Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

- (1) Renja Satuan Tahun 2026 mengikuti Tahapan Penyusunan sebagai berikut :
 - a. persiapan Penyusunan Renja
 - b. penyusunan Rancangan Awal Renja
 - c. penyusunan Rencana Renja
 - d. pelaksanaan Forum Dinas/Lintas Satuan
 - e. perumusan Rencana Akhir Renja
 - f. penetapan Renja
- (2) Tahapan dan Proses Penyusunan Renja yang dilakukan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB III
 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN
 Bagian Kesatu
 Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan wajib melaksanakan pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Satuan, untuk menjamin Renja Satuan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

(2) Kepala

- (2) Kepala Satuan melaksanakan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan.
- (3) Kepala Satuan wajib melaksanakan evaluasi hasil kerja Renja Satuan, untuk memastikan bahwa indikator kinerja, program dan kegiatan Renja dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RKPD dan Renstra Satuan.
- (4) Hasil Pengendalian dan Evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

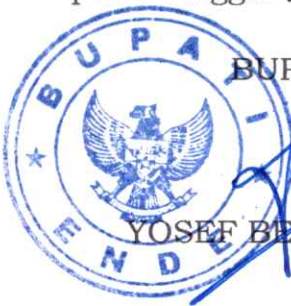
Bagian Kedua
Perubahan
Pasal 7

- (1) Renja Satuan dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renja Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 November 2025
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 43

LAMPIRAN...

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hirarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Satpol PP	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
	2.4 Reviuw Terhadap Rancangan awal RKPD	27
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
	3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
	3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	42
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V	PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2026 merupakan Renja tahun ke Pertama yang mengacu pada RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029. Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2026 dijadikan rujukan sinergi dan konsiten dengan prioritas dan fokus pembangunan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, harus melekat pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sesuai amanat Undang Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rujukan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan guna mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang telah dilaksanakan adalah menyusun bagan alur tahapan penyusunan renja, persiapan penyusunan renja, penyusunan rancangan renja, pelaksanaan forum OPD, dan penetapan Renja.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Ende Nomor Tahun 2025 Tanggal 2025 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2026;
2. Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 236/KEP/HK/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2026);
3. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
4. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan, dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pemabngunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Perubahan Jangka Menengah Derah dan Rencana Kerje Pemerinta Derah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor No 6 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 - 2029;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2025;

9. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2025 Tanggal 18 September 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Nomor 16);

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende ini adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada Tahun 2026.
- b. Tujuannya adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 untuk mengatasi berbagai permasalahan penegakan Perda di Kabupaten Ende.
 2. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
 3. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas untuk menjawab IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional. Tujuan dan sasaran Renja PD dan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB.IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan Kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Perda nomor 11 tahun 2016 yang sebelumnya merupakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Ende.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029 menetapkan beberapa Indikator kinerja urusan Ketenteraman serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Target kinerja dimaksud menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dituangkan dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani
2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan
3. Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Sesuai Standar.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar.

Untuk mencapai indikator dan sasaran di atas serta sesuai dengan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Ende pada

tahun 2024 melaksanakan 3 program dan 11 kegiatan, dengan pagu dana Rp. 7.840.755.624,- dengan pencapaian realisasi sebesar Rp 7.368.366.824,- (93,98%).

Rincian program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

N o	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :	6.792.833.924	6.702.334.974	98,66
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.000.000	32.259.800	76,80
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.381.903.924	6.351.898.260	99,52
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000	0	0
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.500.000	179.688.600	85,77
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.800.000	43.329.544	88,79
2.	6. Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.580.000	20.380.000	99,02
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000	68.778.800	76,42
	8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	706.741.700	370.890.170	52,47
3	Kegiatan :			
	1.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	691.641.700	359.800.170	52,02
	2.Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.000.000	11.090.000	73,93
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	341.180.000	295.141.680	86,50

	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	341.180.000	295.141.680	86,50
--	---	-------------	-------------	-------

Penjelasan sesuai tabel di atas : Program / kegiatan yang memenuhi target / tidak memenuhi target.

Berdasarkan Paparan Program dan kegiatan dalam Tabel 2.1. di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Program dan kegiatan yang belum mencapai 100 persen yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,66%, Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 52,47%, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar 86,50%.

Secara detail pencapaian kinerja program dan kegiatan dari hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian Renstra sampai dengan dengan tahun 2024 (pelaksanaan Renja tahun berjalan Tahun 2024) dapat dilihat pada **Tabel 2.2 TC.29** berikut :

TABEL 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende
Kabupaten : Ende

KODE PROGRAM/ KEGIATAN						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM dan KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2025	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM dan KEGIATAN s/d TAHUN 2025	TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 = 5*7*9	11= 10/4
7	1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 dokumen	2 Dokumen
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan yang tersedia	30 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	24 dokumen	6 dokumen
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan yang tersedia	30 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	24 dokumen	6 dokumen
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	90%	100%	95%	100%	100%	86%	210 orang
7	01	01	2	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Gaji dan Tunjangan ASN	370	99%	210 orang	210 orang	100%	210 orang	210 orang	210 orang
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen
7	01	01	2	02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Seluruh Bahan Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Seluruh Bahan Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	250 Laporan	200 dokumen	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	200 dokumen	50 Laporan
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Regulasi yang Berlaku	250 Laporan	200 dokumen	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	200 dokumen	50 Laporan

7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun n)	250 Laporan	200 dokumen	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	200 dokumen	50 Laporan
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun n)	90 Laporan	7200%	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	7200%	18 Laporan
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Kegiatan Bulanan dan Semester	90 Laporan	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	72 Laporan	18 Laporan
7	01	01	2	02	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Prognosis dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penjaga Malam	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Aset secara Baik dan Benar	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
7	01	01	2	03	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kepegawaian secara Baik	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Diklat Tusi Pegawai	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket

7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Penyediaan Bahan/Material	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 laporan	12 Laporan
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 laporan	12 Laporan
7	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 laporan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 laporan	12 Laporan
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 laporan	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 laporan	1 Laporan
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
7	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	50%		0,00%	#DIV/0!	0,00%	0%	0,00%
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	50%	6 unit	6 unit	#VALUE!	6 unit	0%	6 unit
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	35%	3 unit	3 unit	#VALUE!	3 unit	0%	3 unit
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	50%	3 unit	3 unit	#VALUE!	3 unit	0%	3 unit
7	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	50%	1 unit	1 unit	#VALUE!	1 unit	0%	1 unit
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	50%	1 unit	1 unit	#VALUE!	1 unit	0%	1 unit
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	50%	3 unit	3 unit	#VALUE!	3 unit	0%	3 unit
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	0%	0,00%	#DIV/0!	100%	0%	0%
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1	05	03	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,Keindahan) keindahan)	100%	91%	91%	91%	100,0%	100%	83%	80%
1	05	03	2	01	01	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penindakan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penindakan	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan
1	05	03	2	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penindakan	5 kasus	4 kasus	1 kasus	1 kasus	100%	1 kasus	4 kasus	1 kasus
1	05	03	2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah laporan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah laporan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Perda dan Perkada	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen

1	05	03	2	02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen
1	05	02				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Aduan kebakaran		0%						
1	05	03	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2	01	01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen
1	05	03	2	01	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah laporan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	04	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	05	Penyerenggaran Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah laporan Penyerenggaran Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	07	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan

Penjelasan Tabel 2.2 kaitannya dengan perencanaan dalam Renja 2024, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 7 kegiatan yang direncanakan tetapi hanya 6 kegiatan yang dapat dilaksanakan, 1 kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mencapai target, belum mencapai target ataupun melebihi target dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar 98,66 %, dengan rincian :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	6 dokumen
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi sebesar 94,99 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	210 orang	210 orang
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Laporan	50 Laporan

4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50 Laporan	50 Laporan
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 Laporan	50 Laporan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	12 Paket
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Paket	12 Paket
7	Penyediaan Bahan/Material	12 Paket	12 Paket
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
-----	-------------------	--------	-----------

1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	1 Laporan
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan

5. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	-
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit
4	Pengadaan Mebel	3 unit	-
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	-
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	-
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	3 unit	-

	Bangunan Lainnya		
--	------------------	--	--

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 laporan	1 laporan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 laporan	1 laporan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 laporan	1 laporan
4	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 laporan	1 laporan

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum terdapat 2 kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mencapai target, belum mencapai target ataupun melebihi target dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebesar 91,72% dengan rincian :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1 kasus	1 kasus
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan
5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1 laporan	1 laporan
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan
8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 laporan	1 laporan

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota realisasi sebesar 100 % dengan rincian :

Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 dokumen	1 dokumen
2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 dokumen	1 dokumen

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terdapat 1 kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mencapai target, belum mencapai target ataupun melebihi target dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 100 % dengan rincian :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 100 % dengan rincian :
Sub Kegiatan :

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen
2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 laporan	1 laporan
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 laporan	1 laporan
4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1 laporan	1 laporan
5	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 laporan	1 laporan
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	1 laporan	1 laporan

	Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		
7	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1 laporan	1 laporan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende

Analisis dan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam analisis kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk target maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan oleh suatu instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Kemudian dilakukan pengukuran /penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2025-2029. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat digambarkan pada tabel T.C.30. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing – masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja secara strategis dilakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Di tahun 2024, dari 4 Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja, menggunakan rumus pengukuran kinerja dengan cara membandingkan rencana dan realisasi semuanya mencapai 100%, sehingga capaian indikator kinerja 100% dari pencapaian kinerjanya Renja dan 100% dari pencapaian kinerja Renstra.

Tabel.2.2 TC.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
1	Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja			cc	b	b	b	b	b	Direncanakan minimal 4 Kegiatan setiap Tahunnya, dari total 5 kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan beban kerja serta unsur pelayanan perlindungan masyarakat seoptimal mungkin
1	Persentase Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani.			100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	Direncanakan minimal 4 Kegiatan setiap Tahunnya, dari total 5 kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan beban kerja serta unsur pelayanan perlindungan masyarakat seoptimal mungkin
2	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan			100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	Direncanakan minimal 3 Kegiatan setiap Tahunnya dari 4 kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan beban kerja serta unsur pelayanan perlindungan masyarakat seoptimal mungkin
3	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai standar			100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	Direncanakan minimal 1 Kegiatan setiap Tahunnya dari 2 kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan beban kerja serta unsur pelayanan perlindungan masyarakat seoptimal mungkin

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perubahan Kedua Tahun 2023			Tahun 2024			Jangka Menengah RENSTRA	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah	Persentase Penurunan Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	100%	40%	42,857%	107,14%	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase Penurunan Kasus Kebakaran	100%	100%	100%	4%	7,692	192,31%	100%	100%
		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	100%	15 menit	15 menit	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja	cc	B	100%	B	B	100%	B	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah:

Kinerja pelayanan SATPOL PP Kabupaten Ende pada tahun 2024 dapat terlihat dari 4 indikator yaitu Persentasi Penurunan Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), Persentase Penegakan PERDA dan Perkada yang ditegakkan, Persentase Penurunan Kasus Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Untuk Indikator Persentasi Penurunan Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) terdapat 8 kegiatan, yang dilaksanakan 2 Kegiatan yaitu kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan, Sub Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan dan Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota .

Indikator Persentase Penurunan Kasus Kebakaran terdapat 1 kegiatan yaitu Pencegahan, Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan 7 sub kegiatan yakni Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

2. Permasalahan Dan Hambatan yang dihadapi oleh OPD serta Solusi yang dilakukan :

Beberapa permasalahan yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat antara lain :

- a. Kurangnya komitmen dari segi anggaran bagi kebutuhan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kinerja yang belum bisa terukur dan sistematis menjawab target dari Renstra dan RPJMD Kabupaten Ende;
- b. Keterbatasan jumlah BANPOL SATPOL PP. Penambahan jumlah penduduk harus berbanding lurus dengan kemampuan aparaturnya SATPOL PP dan jumlah petugas lapangan. Hal tersebut memudahkan setiap gerak SATPOL PP dalam melakukan tindakan justisia Penegakan Perda, khususnya dalam melakukan pencegahan berbagai konflik sosial yang terajadi di lingkungan masyarakat demi menjamin keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat Kabupaten Ende

Upaya pemecahan masalah urusan Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat yang dilakukan adalah:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi berbasis kinerja, dengan memberdayakan sumber daya manusia aparaturnya dalam keterbatasan anggaran, sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing dengan tetap mengutamakan prinsip gerak cepat dan tepat dalam menjamin keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Ende;
- b. Melibatkan semua aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende untuk mengoptimalkan potensinya, bekerja keras, mempunyai etos kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;

- c. Memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bahwa substansi seluruh program dan kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap capaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende;
 - d. Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas kerja berbasis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
3. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yaitu “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” serta misi kelima yaitu “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat”. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai dengan RENSTRA 2019-2024 dalam 5 (lima) indikator kinerja utamanya berupaya untuk terus mencapai hasil yang maksimal dalam kualitas dan kuantitas pelayanan pada sektor perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :
- Tantangan (Threats) antara lain :
- a. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada masa mendatang harus memiliki pejabat fungsional khusus yang sigap dan handal serta dapat menjalankan tugasnya yang serumpun dengan penyidik dan atau detektif. Jumlah kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang menduduki jabatan fungsional haruslah memadai dengan memperhitungkan perbandingan jumlah personel dengan jumlah penduduk Kabupaten Ende dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat fungsional ini nantinya dapat berpeluang pada semua bidang yang berada dalam kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende itu sendiri seperti pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang

perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum & ketentraman masyarakat, bidang peningkatan sumber daya aparatur serta bidang pemadam kebakaran. Disamping hal itu, untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, lebih mumpuni lagi bila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende memiliki banyak tenaga pegawai yang menguasai ITE (Informasi Teknologi Elektronik), hingga akhirnya akan lebih mudah mengakses informasi maupun data yang diperlukan guna mengoptimalkan kinerjanya.

- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama dalam memberikan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyaluran aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan tujuan kegiatan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat menyelesaikan kasus - kasus pelanggaran Peraturan Daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat mempersiapkan personelnnya lebih berkualitas dan berkuantitas, terutama dari pengerahan anggota yang sigap saat terjadi peristiwa insidentil seperti; huru-hara, bencana daerah (baik yang diakibatkan alam/human error/sosial dll), keadaan “chaos” karena pertikaian antar desa/kampung/dusun/geng motor yang timbulkan keresahan masyarakat, peningkatan pengamanan Kepala Daerah dan kerusuhan/kekacauan dalam bentuk lain sebagainya.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakkan mobilitas yang bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam.

Peluang (Opportunities) :

Ada peluang (opportunity) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas dan kualitas “sepak terjang” Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis website dan online yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi program-program pembangunan daerah yang akan/sedang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende;
 - b. Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi vertikal maupun pemerintah provinsi/pusat;
 - c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantapan sistem keamanan lingkungan seperti: intensitas kegiatan siskamling, partisipan yang membantu tugas-tugas anggota Linmas untuk keamanan lingkungan pada semua unsur kewilayahan;
 - d. Pemerintah Prop/ Kab/ Kota dan Pihak ketiga baik yang berasal dari kementerian/non kementerian, badan hukum, yayasan, yang menawarkan kerjasama dalam rangka pemantapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende di masa - masa mendatang;
 - e. Bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Ende terhadap Peraturan Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - f. Lahirnya produk hukum pemerintah daerah/pusat yang memperluas cakupan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dimasa-masa mendatang, sehingga berdampak pada perluasan kewenangan tugas maupun fungsinya.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan :
- Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Ende nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Ende Ende Nomor 35 Tahun 2016 tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende adalah

membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah bidang Ketenteraman dan Ketertiban. Adapun beberapa rekomendasi dan catatan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Anggaran yang terbatas bagi peningkatan kualitas SDM, Sumber daya sarana dan prasarana operasional bagi kepentingan pelayanan publik;
2. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Keterlibatan masyarakat terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanis dan persuasif;
5. Tuntutan peningkatan kesiagaan bencana bahaya kebakaran dan rehabilitasi pasca bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan analisis kebutuhan yang mendasar, dalam dua tahun usulan-usulan yang ditargetkan perencanaannya melalui Rencana Kerja OPD dengan kegiatan-kegiatan dan program yng terukur, sistematis, dan terkoneksi dengan Renstra, terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende, namun hal ini berbenturan dengan kepentingan pihak-pihak seperti : perencanaan politis, teknokratis, kebutuhan situasional serta minimnya anggaran. Dengan situasi tersebut Perangkat Daerah SATPOL PP mengikuti pelaksanaan anggaran yang sudah melalui mekanisme penetapan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada prinsipnya kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan. Konsep awal anggaran berbasis kinerja tidak dapat dilaksanakan secara maksimal bahkan target kinerja SATPOL PP Kab.Ende tidak dapat terealisasi secara maksimal dengan begitu minimnya alokasi anggaran.

Dokumen perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis

SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja SATPOL PP Kabupaten Ende Tahun 2024, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menyesuaikan dengan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024. Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dapat dilihat pada **Tabel 2.4 . TC.31** pada pemaparan dibawah ini :

TABEL 2.4. TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
SATPOL PP KABUPATEN ENDE

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satpol PP			7.750.000.000,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satpol PP			7.750.000.000,00	
1	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.500.000.000,00	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.500.000.000,00	
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				6.500.000.000,00	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				6.500.000.000,00	
	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.000.000,00	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	10.000.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	10.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	500.000,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	2.000.000,00	Tertelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	2.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	500.000,00	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	500.000,00	Tertelaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	500.000,00	Tertelaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5	5.000.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5	5.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.093.200.000,00	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.093.200.000,00	
	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	150	6.061.700.000,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	150	6.061.700.000,00	
	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	10.000.000,00	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	10.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	50	15.000.000,00	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	50	15.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	500.000,00	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	500.000,00	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	2.000.000,00	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	2.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	3.000.000,00	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	3.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	3.000.000,00	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	3.000.000,00	
	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.600.000,00	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.600.000,00	
	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	100.000,00	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	100.000,00	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	100.000,00	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	100.000,00	
	1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	100.000,00	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	100.000,00	
	1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	100.000,00	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	100.000,00	
	1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	100.000,00	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	100.000,00	
	1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	500.000,00	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	500.000,00	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	500.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	200.000,00	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	200.000,00	
	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		28.100.000,00	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		28.100.000,00	
	1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	500.000,00	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	5.000.000,00	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	5.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	500.000,00	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	100.000,00	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	100.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1	500.000,00	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	1	500.000,00	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	20.000.000,00	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	20.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	500.000,00	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	500.000,00	
	1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	500.000,00	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	500.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	500.000,00	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		136.100.000,00	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		136.100.000,00	
	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10.000.000,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	20.000.000,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	20.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	10.000.000,00	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	10.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	20.000.000,00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	20.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	10.000.000,00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	10.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	100.000,00	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	100.000,00	
	1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Tersedianya Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	10.000.000,00	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	10.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	50.000.000,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	50.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	500.000,00	
	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60.000.000,00	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	35.000.000,00	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	35.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	
	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	
	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70.000.000,00	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500	5.000.000,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500	5.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	20.000.000,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	20.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	20.000.000,00	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	20.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	25.000.000,00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	25.000.000,00	
	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		90.000.000,00	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		90.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	50.000.000,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	50.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	10.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	10.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000,00	
2	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				750.000.000,00	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				750.000.000,00	
	Peningkatan Kasus Trantibum yang terselesaikan				750.000.000,00	Peningkatan Kasus Trantibum yang terselesaikan				750.000.000,00	
	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,Keindahan) keindahan)		570.000.000,00	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,Keindahan) keindahan)		570.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	15.000.000,00	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	15.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	2	80.000.000,00	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	2	80.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	20.000.000,00	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	20.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	10.000.000,00	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	10.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1	30.000.000,00	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1	30.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	1	10.000.000,00	meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	1	10.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	120.000.000,00	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	120.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	10	50.000.000,00	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	10	50.000.000,00	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	10	50.000.000,00	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	10	50.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	110.000.000,00	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	110.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	6	20.000.000,00	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	6	20.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1	5.000.000,00	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	2	50.000.000,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	2	50.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1	10.000.000,00	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1	10.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	2	30.000.000,00	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	2	30.000.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	2	30.000.000,00	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	2	30.000.000,00	
	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas		110.000.000,00	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas		110.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1	30.000.000,00	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1	30.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1	10.000.000,00	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1	10.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1	10.000.000,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1	10.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	10.000.000,00	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	10.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	30.000.000,00	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	30.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PPNS		70.000.000,00	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PPNS		70.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1	5.000.000,00	Terbentuknya Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1	5.000.000,00	Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1	5.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	50.000.000,00	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	50.000.000,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	50.000.000,00	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	50.000.000,00	
3	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				500.000.000,00	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				500.000.000,00	
	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran				500.000.000,00	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran				500.000.000,00	
	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran		385.000.000,00	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran		385.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	10	75.000.000,00	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	10	75.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	10	75.000.000,00	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	10	75.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	20.000.000,00	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	20.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	100	50.000.000,00	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	100	50.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1	5.000.000,00	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran		Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	1	5.000.000,00	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran		Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran		Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran (Dokumen)	1	30.000.000,00	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran		Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran (Dokumen)	1	30.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran		Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran		Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2	40.000.000,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2	40.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	50	50.000.000,00	Tertersedianya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	50	50.000.000,00	
	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Tertersedianya pendataan sarana dan prasarana		10.000.000,00	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Tertersedianya pendataan sarana dan prasarana		10.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tertersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tertersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran		Tertersedianya investigasi kejadian kebakaran		5.000.000,00	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran		Tertersedianya investigasi kejadian kebakaran		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1	5.000.000,00			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tertersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Tertersedianya Simulasi Cegah Dini Bahaya Bencana Kebakaran		55.000.000,00	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Tertersedianya Simulasi Cegah Dini Bahaya Bencana Kebakaran		55.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	20	45.000.000,00	Tertersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	20	45.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1	5.000.000,00	Tertersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tertersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	Tertersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tertersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Tertersedianya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		45.000.000,00	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Tertersedianya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		45.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	5.000.000,00	Tertersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	1	5.000.000,00	Tertersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	10.000.000,00	Tertersedianya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	10.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	2	25.000.000,00	Tertersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	2	25.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun beberapa usulan yang diperoleh melalui beberapa metode perencanaan untuk mengakomodir berbagai kepentingan serta menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, meliputi perencanaan bottom up (Musrenbang), melalui intervensi kepentingan politik (aspirasi masyarakat lewat pokok pikiran DPRD) juga melalui pemetaan secara teknis berdasarkan kebutuhan secara kabupaten. Usulan-usulan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan mencerminkan keterwakilan dan sesuai dengan konteks serta sejalan dengan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, namun setelah ditelaah secara cermat usulan dimaksud secara teknis perlu direvisi baik secara anggaran juga kelayakan usulannya. Usulan kegiatan masyarakat Desa dan Kelurahan yang diperoleh saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENGBANG) Kecamatan dan yang selanjutnya difinalisasikan pada tingkat MUSRENGBANG Kabupaten, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 TC.32 berikut ini :

Tabel 2.5.TC.32

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2026 PROVINSI NTT/KABUPATEN/KOTA**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE

No	Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Desa/Kelurahan	Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban						
		Desa Tina Bani	Ende	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	15 orang	25.000.000	
		Desa Mbombengga	Nangapanda	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	5 orang	15.000.000	
		Kelurahan Paupire	Ende Tengah	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	1.Paket	8.000.000	
		Desa Je'o D'ua	Detukeli	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	6 orang	15.000.000	
		Desa Waturaka	Kelimutu	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	1 Paket	15.000.000	
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Visi Pembangunan Nasional 2025-2045 yaitu : mempercepat terwujudnya “Indonesia Emas” dengan focus pada peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan berkelanjutan serta penurunan kemiskinan dan kesenjangan, dengan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Asta Cita” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan memiliki kemampuan berdaya saing dalam lingkup Perlindungan Masyarakat dan Penegakkan Peraturan Daerah mengandung arti: “memiliki kemampuan mengayomi serta memberikan perlindungan secara optimal yang dihasilkan melalui pola pengawasan, penindakan serta pembinaan, secara terukur, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan Stanndart Operasional dan Standart Pelayanan Mayarakat yang terpadu dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan sisi humanis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Ende Yang Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Berbasiskan Iman Dan Budaya Menuju Ende Lio Nage Sare Pawe”

Visi ini dijabarkan melalui 6 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
2. Mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Mewujudkan supremasi hukum dan *good governance* dengan mengoptimalkan peran stakeholders serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien

4. Mewujudkan konektivitas antar wilayah yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, berkeadilan dan ramah lingkungan.
5. Mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah
6. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi berbasis potensi wilayah spesifik dan tata ruang

Sesuai tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende mendukung pencapaian misi ke dua yaitu “Mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru dan misi ke lima yaitu Mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah.

Guna mencapai visi dan misi Pembangunan Daerah maka OPD membuat Renstra OPD untuk menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta mitigasi dan penanggula ngan bencana Kebakaran.	1. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja.	1. Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakkan Peraturan Daerah;	2. Persentase Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani
		3. Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai standar	3. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
			1. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai standar

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selain berpedoman pada RPJMD 2025– 2029, faktor yang juga menjadi bahan pertimbangan antara lain pencapaian Visi Misi Bupati Ende. Berikut strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang tertuang dalam Renstra tahun 2025– 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkat nya ketenteram an dan ketertiban masyarakat serta mitigasi dan penanggula ngan bencana Kebakaran.	Meningkat nya Ketentera man dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakkan Peraturan Daerah;	1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 2. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam upaya mengatasi masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat.	1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Peningkatan pemantauan, penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah 3. Peningkatan kesiagaan Aparatur dalam mengamankan wilayah dari tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini
	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai standar	Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan, Penyuluhan / sosialisasi dalam upaya mengatasi masalah serta penanganan kasus Kebakaran dan	Peningkatan kesiagaan bencana Kebakaran

		Non Kebakaran	
	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja.	Meningkatkan kinerja layanan pemerintah dan layanan publik	Meningkatnya kinerja Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan Evaluasi

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a. Faktor internal

Pada faktor internal ini SATPOL PP Kabupaten Ende telah merumuskan berbagai program dan kegiatan berdasarkan pemetaaan secara internal dengan melihat program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan juga perubahan atas Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selain berdasarkan regulasi yang ada hal yang paling mendasar disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pemetaan potensi rawan konflik di Kabupaten Ende.

b. Faktor eksternal

SATPOL PP Kabupaten Ende wajib meterjemahkan visi misi Bupati Ende periode 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende. Faktor eksternal inilah yang memicu SATPOL PP Kabupaten Ende mendesain kegiatan, program yang dapat menjawab apa yang dicita-citakan selama lima tahun.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Secara garis besar meliputi program-program yang dibuat melalui terjemahan kegiatan pada Tahun 2026 sebagai berikut; Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang kami paparkan sudah terkoneksi dengan perubahan sinkronisasi PERMENDAGRI nomor 90 tahun 2019. Dan terkoneksi dengan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

3. Adapun beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan dari awal dan sudah terekam dalam RKPD pada akhirnya juga disesuaikan kembali berdasarkan prioritas serta kondisi anggaran Kabupaten Ende.

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
Tabel 3.3. T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Nusa Tenggara Timur/Kabupaten Ende Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende seperti pada pemaparan dalam tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. ENDE
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					7.750.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		7.901.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.500.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					6.627.400.000,00	
Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun					6.500.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					6.627.400.000,00	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					21.315.000,00	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			6	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				6	10.150.000,00	
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			6	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				6	507.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1 05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		2.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			6	2.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				6	2.030.000,00	
1 05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terseleenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1 05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1 05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)			5	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				5	5.075.000,00	
1 05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.093.200.000,00		Dana Transfer umum-DAU					6.214.513.000,00	
1 05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.061.700.000,00		Dana Transfer umum-DAU					6.182.540.500,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			150	6.061.700.000,00		Dana Transfer umum-DAU				150	6.182.540.500,00	
1 05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			12	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				12	10.150.000,00	
1 05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					15.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					15.225.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			50	15.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				50	15.225.000,00	
1 05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		507.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					2.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					2.030.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			1	2.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	2.030.000,00	
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					3.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					3.045.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			1	3.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	3.045.000,00	
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.600.000,00		Dana Transfer umum-DAU					1.624.000,00	
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					100.000,00		Dana Transfer umum-DAU					101.500,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	100.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	101.500,00	
1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					100.000,00		Dana Transfer umum-DAU					101.500,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	100.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	101.500,00	
1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					100.000,00		Dana Transfer umum-DAU					101.500,00	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)			1	100.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	101.500,00	
1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					100.000,00		Dana Transfer umum-DAU					101.500,00	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	100.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	101.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB	
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET		PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		507.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					200.000,00		Dana Transfer umum-DAU					203.000,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			1	200.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	203.000,00	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28.100.000,00		Dana Transfer umum-DAU					28.514.000,00	
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					100.000,00		Dana Transfer umum-DAU					101.500,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1	100.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	101.500,00	
1.05.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					500.000,00	
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	500.000,00	
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.300.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			1	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	20.300.000,00	
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			150	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				150	507.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1 05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		507.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1 05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				136.100.000,00		Dana Transfer umum-DAU					138.141.500,00	
1 05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			3	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				3	10.150.000,00	
1 05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.300.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			3	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				3	20.300.000,00	
1 05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			3	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				3	10.150.000,00	
1 05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.300.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			3	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				3	20.300.000,00	
1 05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			3	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				3	10.150.000,00	
1 05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					100.000,00		Dana Transfer umum-DAU					101.500,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			1	100.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	101.500,00	
1 05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1 05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			3	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				3	10.150.000,00	
1 05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					50.750.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			5	50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				5	50.750.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		507.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					500.000,00		Dana Transfer umum-DAU					507.500,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			1	500.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	507.500,00	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				60.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					60.900.000,00	
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					35.525.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			1	35.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	35.525.000,00	
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			2	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				2	10.150.000,00	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					15.225.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			2	15.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				2	15.225.000,00	
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		Dana Transfer umum-DAU					0	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				0		Dana Transfer umum-DAU					0	
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		Dana Transfer umum-DAU					0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				0		Dana Transfer umum-DAU					0	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					71.050.000,00	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			500	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				500	5.075.000,00	
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.300.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			36	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				36	20.300.000,00	
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.300.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			5	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP	5	20.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					25.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					25.375.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			12	25.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				12	25.375.000,00	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				90.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					91.342.500,00	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					50.750.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			10	50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				10	50.750.000,00	
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.292.500,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			1	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	20.292.500,00	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					750.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					764.700.000,00	
Peningkatan Kasus Trantibum yang Terselesaikan					750.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					764.700.000,00	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,Keindahan) keindahan)				570.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					582.000.000,00	
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					15.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					15.225.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)			1	15.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	15.225.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					80.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		81.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)			2	80.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				2	81.200.000,00	
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.300.000,00	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)			1	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	20.300.000,00	
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional					30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					33.900.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)			1	30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	33.900.000,00	
1.05.02.2.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat					120.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					121.800.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)			100	120.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				100	121.800.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		50.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)			10	50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				10	50.750.000,00	
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					110.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					111.650.000,00	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)			12	110.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				12	111.650.000,00	
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.300.000,00	
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)			6	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				6	20.300.000,00	
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					50.750.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)			2	50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				2	50.750.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		10.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					30.450.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)			2	30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				2	30.450.000,00	
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas				110.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					111.650.000,00	
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					30.450.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)			1	30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	30.450.000,00	
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		30.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)			1	30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	30.450.000,00	
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PPNS				70.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					71.050.000,00	
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					50.750.000,00	
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)			1	50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	50.750.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					500.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		509.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran					500.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					509.800.000,00	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran				385.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					392.075.000,00	
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					76.125.000,00	
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)			10	75.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				10	76.125.000,00	
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					75.125.000,00	
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			10	75.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				10	75.125.000,00	
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					20.300.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)			1	20.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	20.300.000,00	
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		53.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)			100	50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				100	53.050.000,00	
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran					30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					30.450.000,00	
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)			1	30.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	30.450.000,00	
1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					40.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		40.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)			2	40.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				2	40.600.000,00	
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga					50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					50.750.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)			50	50.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					50.750.000,00	
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana				10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran				5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		5.075.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Simulasi Cegah Dini Bahaya Bencana Kebakaran				55.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					55.825.000,00	
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					45.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					45.675.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)			20	45.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				20	45.675.000,00	
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia				45.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					46.675.000,00	
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					5.075.000,00	
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PENANGGUNG JAWAB
				2026		PRIORITAS				KELOMPOK SASARAN	2027		
				TARGET	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU			SATPOL PP		5.075.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)			1	5.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	5.075.000,00	
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					10.150.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)			1	10.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				1	10.150.000,00	
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					25.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU					26.375.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)			2	25.000.000,00		Dana Transfer umum-DAU				2	26.375.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dipaparkan rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah yang merupakan rumusan dan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2026. Gambaran yang terdapat dalam tabel T.C.33. rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 dapat kami deskripsikan sebagai berikut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada tahun 2026 mendapat alokasi Pagu Indikatif sementara sejumlah Rp.7.716.912.436,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan rincian : Kebutuhan Rutin Kantor / Program Urusan Penunjang sebesar Rp 7.247.335.994,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), Kebutuhan kegiatan yang mendukung Indikator Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 469.576.442,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah),

Pagu indikatif sementara tersebut direncanakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari : 1 (satu) program rutin dengan 8 kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua) sub kegiatan, serta 2 (dua) program yang melekat di bidang-bidang dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 57 (Lima Puluh Tujuh) sub kegiatan. Di bawah ini kami memaparkan rincian program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Rp. 7.247.335.994,-)
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rp.21.000.000,-)
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Rp 6.790.353.994,-)
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Rp. 1.600.000)

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Rp 28.100.000,-)
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Rp 161.100.000,-)
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rp.60.000.000,-)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Rp.70.000.000)
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Rp.115.000.000,-)
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Rp.225.794.521,-)
- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Rp.126.794.521,-)
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Rp.34.000.000,-)
 - Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota (Rp.50.000.000,-)
 - Pemberdayaan Satgas di Daerah (15.000.000)
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Rp.243.781.922,-)
- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Rp.158.781.922,-)
 - Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (2.000.000)
 - Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran (5.000.000)
 - Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Yang Membahayakan Manusia (45.000.000)
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran (33.000.000)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029. Program dan kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2026 ini diharapkan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dengan tetap mengedepankan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat dan masyarakat.

Dalam penjabarannya diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen bersama untuk menetapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Renja, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
2. Rencana kerja selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan wajib dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati Ende;
4. Pada akhir tahun dilakukan evaluasi menyeluruh dengan mengintegrasikan capaian pelaksanaan program/kegiatan dengan target capaian RENSTRA untuk dijadikan bahan bagi penyusunan rencana kerja periode perencanaan berikutnya.
5. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Akhirnya, dengan memohon Rahmat dan Penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2026 ini, dengan harapan agar pembangunan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ende akan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.



BUPATI ENDE
YUSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hirarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Satpol PP	